

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekolah adalah sebuah pranata sosial yang bersistem, terdiri atas komponen-komponen yang saling terkait dan pengaruh mempengaruhi. Komponen utama sekolah adalah siswa, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, kurikulum, serta fasilitas pendidikan. Selain itu, pemangku kepentingan (*stakeholder*) juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini orangtua dan masyarakat merupakan pemangku kepentingan yang harus dapat bekerja sama secara sinergis dengan sekolah.

Dalam paradigma lama, hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dipandang sebagai institusi yang terpisah-pisah. Pihak keluarga dan masyarakat dipandang tabu untuk ikut campur tangan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Apalagi sampai masuk ke wilayah kewenangan profesional para guru. Dewasa ini, paradigma lama ini dalam batas-batas tertentu telah ditinggalkan. Keluarga memiliki hak untuk mengetahui tentang apa saja yang diajarkan oleh guru di sekolah. Orangtua siswa memiliki hak untuk mengetahui dengan metode apa anak-anaknya diajar oleh guru-guru mereka. Dalam paradigma transisional, hubungan keluarga dan sekolah sudah mulai terjalin, tetapi masyarakat belum melakukan kontak dengan sekolah. Dalam paradigma baru hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat terjalin secara sinergis untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dan mutu hasil belajar siswa di sekolah. (Suparlan, dkk. 2006)

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga di dalamnya menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Masyarakat adalah *stakeholder* pendidikan yang memiliki kepentingan akan keberhasilan pendidikan di sekolah. Masyarakat adalah pembayar atau pelanggan pendidikan, baik melalui pembiayaan langsung dalam langkah kegiatan sekolah maupun pajak, sehingga sekolah seharusnya bertanggung jawab kepada masyarakat. Sekolah melakukan hubungan dengan masyarakat dan dilakukan melalui "perwakilan" fungsi *stakeholder*, dengan jalan membentuk komite sekolah pada setiap satuan pendidikan (Hendarmoko dan Syamsudin, 2008)

Masyarakat diharapkan dapat mewakili keragaman masyarakat yang ada. Selain itu, pembentukan komite sekolah pada hakikatnya dalam rangka mengantisipasi perubahan dan perkembangan di setiap wilayah sebagai upaya memperhatikan keberagaman kebutuhan pendidikan sesuai dengan keadaan daerah dan peserta diri. Oleh karena itu pembentukan komite sekolah antara lain berkaitan dengan adanya keinginan suatu organisasi yang dapat membuat dan membantu masyarakat terlibat dalam pendidikan seperti dalam penyediaan dana sarana dan prasarana, bahkan pengelolaan pun agar dapat dilakukan. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut antara lain dengan mengembalikan "kepemilikan" sekolah kepada masyarakat yaitu melalui komite sekolah. (Hendarmoko dan Syamsudin, 2008)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 2010 disebutkan pembentukan komite sekolah bertujuan yaitu: (a) mewadahi dan menyalurkan

aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di tingkat pendidikan; (b) meningkatkan tanggungjawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; (c) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Dua prinsip yang harus dipegang dalam proses pembentukan Komite Sekolah, yakni: (a) dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan demokratis; (b) Komite Sekolah yang dibentuk harus dapat menjadi mitra sejajar dengan satuan pendidikan.

Sejak dilahirkan tahun 8 (delapan) tahun lalu, keberadaan dan peran Komite Sekolah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan sekolah di Klaten Utara masih mengalami banyak kendala, baik dari segi status, kinerja, peran, kualitas SDM, maupun sarana dan prasarana yang dimiliki. USAID-MBE (2007) menuliskan salah satu penyebabnya adalah komunikasi antara komponen sekolah seperti guru, kepala sekolah dan wali murid dengan anggota Komite Sekolah masih jarang dilakukan, sehingga keputusan dan tindakan sekolah diambil secara sepihak oleh sekolah. Kondisi demikian menyebabkan kepala sekolah dan guru lebih banyak mengambil peran dalam pengambilan keputusan di sekolah, sedangkan masyarakat belum diikutkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Pada situasi tersebut, peran masyarakat dan orangtua/walimurid hanya sebagai penerima keputusan, selain itu sebagian masyarakat dan orangtua/walimurid menyerahkan sepenuhnya urusan pendidikan kepada sekolah sehingga yang terjadi orangtua/wali murid kurang peduli terhadap sekolah.

Hasil penelusuran dokumen yang dilakukan peneliti di beberapa SD di Kecamatan Klaten Utara terdapat komite yang belum membuat *job description* berupa panduan masing-masing personel dalam bertanggung jawab atas terlaksananya tugas yang diemban. Di samping itu, belum tersedia panduan tata hubungan antar personel pada setiap jabatan menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, serta masing-masing koordinator bidang belum ada koordinasi dan pembagian tanggungjawab secara jelas. Selain itu partisipasi masyarakat selama ini lebih banyak bersifat dukungan dana, tidak pada proses pendidikan seperti pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas.

Peran komite sekolah terhadap peran pengembangan kualitas pendidikan masih terbatas. Hal ini diungkap oleh salah seorang guru yang berinisial M ;

“Komite Sekolah belum banyak berperan, meskipun sudah jalan tetapi belum optimal karena masih sebatas untuk administrasi keuangan seperti pengesahan RAPBS, laporan BOS, dan kegiatan-kegiatan untuk menggalang iuran wali murid apabila ada pembangunan di sekolah”.

Salah seorang guru, kepada peneliti juga mengatakan sebagai berikut:

“Komite Sekolah belum berperan, yang berperan sebatas guru dan kepala sekolah. Untuk peningkatan sarana prasarana sekolah dalam PBM juga belum ada, walaupun bantuan orangtua biasanya yang buat fisik, kalau non fisik belum”

“Biasanya diusahakan oleh pihak sekolah. Peningkatan kualitas guru biasanya kan dengan swadana, walaupun ada yang dapat beasiswa dari pemerintah sangat kecil jumlahnya. Secara umum peran komite di sekolah ini belum ada yang berdampak pada proses pembelajaran di kelas”
(wawancara tgl 12-5-2011)

Berdasarkan pengamatan dan proses pendampingan selama kurang lebih 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Klaten kondisi atau gambaran faktual

permasalahan yang berkaitan dengan peran dan fungsi komite sekolah dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Deskripsi Masalah Peran dan Fungsi Komite Sekolah (KS)
Di Kecamatan Klaten Utara

No	Deskripsi Masalah Komite
1	Struktur organisasi kurang tertib (mis, jarang memuat mekanisme kerja masing-masing anggota secara lengkap)
2	<i>Job description</i> anggota kurang dipahami
3	Kurang terlibat dalam penyusunan RKS/RKT/RKAS
4	Fasilitas penunjang minim
5	Kurang menjangkau aspirasi wali murid
6	Pembentukan Komite Sekolah tanpa rencana matang
7	Kurang mampu mengidentifikasi masalah yang terjadi di sekolah
8	Belum bekerjasama dengan lembaga / komite sekolah lain
9	Kegiatan operasional masih minim

Hasil observasi dan wawancara (2010-2011)

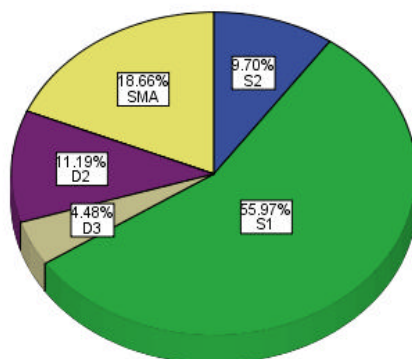
Tabel 1 mendeskripsikan beberapa masalah yang berkaitan dengan peran dan fungsi komite sekolah, selain itu masih banyak permasalahan lain yang belum diungkap dan menghambat optimalisasi kinerja komite sekolah. Secara kualitatif, keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah memang belum sepenuhnya dapat mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan. Guna meningkatkan kinerja Komite Sekolah/Madrasah, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Depdiknas tersebut, maka perlu dipahami secara lebih jelas karakteristik yang berpengaruh terhadap kinerja anggota komite sekolah.

Berdasarkan data dokumentasi komposisi anggota komite sekolah sebagai berikut:

Tabel 2
Karakteristik Anggota Komite Sekolah
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Nama Sekolah	Data Pendidikan					Total
		S2	S1	D3	D2	SMA	
1	SDN Barenglor 1		4		2	2	8
2	SDN Barenglor 2	5	8			2	15
3	SDN Barenglor 3		7	2	2	1	12
4	SDN Barenglor 4	2	3			3	8
5	SDN Gergunung 1	1	4		5	1	11
6	SDN Gergunung 2	1	4			2	7
7	SDN Karanganom 1	2	9				11
8	SDN Karanganom 3	1	11		1	5	18
9	SD Sugiyopranata	1	12	1	1	1	16
10	MI Gading 1		11	3	2	3	19
11	SDN Jebukan 1		2		2	5	9
	Total	13	75	6	15	25	134

Berikut gambaran komposisi tingkat pendidikan dalam grafik 1



Grafik 1
Komposisi Tingkat Pendidikan Anggota Komite Sekolah

Berdasarkan tabel 2 dan grafik 1 diketahui dari 134 anggota komite sekolah tingkat pendidikan paling banyak yaitu S1 sebanyak 75 orang, kemudian SMA sebanyak 25 orang, S2 sebanyak 13 orang, D3 sebanyak 15 orang dan D2 sebanyak 6 orang. Tingkat pendidikan yang bervariasi tersebut akan dilihat seberapa besar pengaruhnya terhadap kinerja sebagai anggota komite sekolah.

Menurut Jewel dan Siegall (1998) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja di antaranya adalah: (a) Individual, yang meliputi sifat-sifat fisik, sifat-sifat pribadi, minat ataupun motivasi, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pengalaman (b) Situasional, yang meliputi faktor fisik dan antara lain mencakup kerja, peraturan dan kondisi perlengkapan kerja, keadaan lingkungan seperti penyiangan, dan kebisingan maupun ventilasi; (c) sosial dan organisasi antara lain kebijakan organisasi, jenis latihan dan pengawasan dan upah.

Masalah pendidikan adalah merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan. Bahkan tidak hanya sangat penting saja, melainkan masalah pendidikan sama sekali tidak dapat di pisahkan dari kehidupan. Pendidikan itu mutlak sifatnya dalam kehidupan, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bangsa dan negara. Maju mundurnya suatu bangsa atau negara sebagian besar ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan di negara itu. Yamin (2009) menyatakan pendidikan adalah media mencerdaskan kehidupan bangsa dan membawa bangsa ini pada era *aufklarung* (pencerahan). Pendidikan bertujuan untuk membangun tatanan bangsa yang berbalut dengan nilai-nilai kepintaran, kepekaan, dan kepedulian terhadap kehidupan bangsa dan negara. Tingkat pendidikan seseorang akan mempunyai kecenderungan untuk mempengaruhi bidang lainnya, misalnya seseorang yang berpendidikan tinggi akan cenderung menduduki jabatan atau kedudukan yang tinggi pula, dengan jabatan itu maka seseorang akan mendapatkan imbalan yang tinggi, sehingga pendapatan atau kekayaan pun akan semakin bertambah. Oleh karena itu tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pemahaman peran dan fungsi komite sekolah.

Guna mendapat gambaran bagaimana kinerja anggota komite sekolah maka perlu dilakukan kajian sejauhmana tingkat pendidikan anggota komite sekolah berpengaruh terhadap kinerja anggota komite sekolah. Atas dasar tersebut maka rumusan masalah penelitian ini yaitu: Apakah tingkat pemahaman terhadap peran komite sekolah berpengaruh terhadap kinerja komite sekolah? Berdasarkan rumusan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: Hubungan antara tingkat pendidikan dan pemahaman terhadap peran komite sekolah dengan kinerja komite sekolah di Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Hubungan antara pemahaman terhadap peran komite sekolah dengan kinerja komite sekolah di Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten.
2. Perbedaan kinerja komite sekolah ditinjau dari tingkat pendidikan anggota komite sekolah.
3. Tingkat pemahaman terhadap peran komite sekolah
4. Tingkat kinerja komite sekolah

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Memberikan wacana pemikiran dan menambah khasanah ilmu pengetahuan pada bidang psikologi pendidikan khususnya tentang hubungan antara pemahaman terhadap peran komite sekolah dengan kinerja komite sekolah di

Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, serta perbedaan kinerja komite sekolah ditinjau dari tingkat pendidikan.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan sumbangan informasi, pemikiran dan masukan kepada komponen penyelenggara pendidikan dan anggota Komite Sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
- b. Memberikan informasi serta masukan kepada Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan dalam merumuskan kebijakan peran Komite Sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan

D. Keaslian Penelitian

Beberapa tema berkaitan dengan peran dan fungsi komite sekolah pernah dikaji dan diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun demikian sepanjang penelusuran penulis belum ada penelitian yang sama persis baik dari segi variabel maupun responden dan metodologinya. Agar lebih jelas berikut ini dipaparkan beberapa penelitian atau riset yang relevan dengan tema penelitian yang penulis lakukan.

Penelitian Raihani (2007) mengenai reformasi pendidikan di Indonesia menyatakan peran penting komite sekolah, yang terdiri partisipasi tokoh masyarakat, profesional, kepala sekolah, wakil guru, perwakilan otoritas pendidikan, dan perwakilan orangtua siswa, bertanggung jawab untuk memilih kepala sekolah, mengumpulkan uang, kontrol keuangan sekolah dari masyarakat, *block grant*, dana pemerintah pusat (kecuali gaji), dan terlibat dalam

pengembangan kurikulum. Komite sekolah terbentuk juga harus berkomitmen untuk melaksanakan visi dan misi, serta berperan secara demokratis dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan.

Rose (2003) pada penelitian yang menungkap tentang komunitas, jender dan pendidikan menyimpulkan bahwa, partisipasi masyarakat dalam pendidikan dipandang sebagai cara untuk meningkatkan sumber daya, meningkatkan akuntabilitas sekolah kepada masyarakat yang mereka layani, memastikan lebih efektif biaya penggunaan sumber daya dan yang penting, bersikap responsif terhadap kebutuhan lokal. Oleh karena itu partisipasi masyarakat khususnya melalui komite sekolah dapat juga berperan untuk meningkatkan akses yang adil, retensi, kualitas dan kinerja sekolah. Baraldi dan Paletta (2007) pada penelitian mengenai kemitraan dewan sekolah menyatakan bahwa perusahaan swasta dapat masuk ke dalam kemitraan dan bentuk-bentuk keterlibatan membentuk dan merestrukturisasi sekolah di perkotaan, walikota, pejabat negara dan pihak luar lainnya memiliki kewenangan dan intervensi untuk menunjuk dewan sekolah agar pengawasan terhadap administrasi sekolah lebih efektif

Grauwe (2005) pada penelitian yang mengungkap tentang peningkatan kualitas pendidikan berbasis manajemen, menyimpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah bukanlah kebijakan tanpa nilai kepada masyarakat berkembang, atau tidak membawa janji untuk perbaikan kualitas. Sebaliknya pelaksanaannya perlu disertai dengan strategi untuk membangun kapasitas sekolah, kepala-guru dan peran serta masyarakat, didorong oleh fokus yang jelas pada peningkatan kualitas dan perhatian untuk ekuitas. Apa yang dibutuhkan mungkin lebih dari

manajemen berbasis sekolah yaitu sistem manajemen yang berorientasi pada dukungan sekolah. Oleh karena partisipasi masyarakat merupakan potensi yang sangat penting untuk memaksimalkan kualitas pendidikan berbasis manajemen. Tucker dan Slatte (2002) pada penelitian yang membahas mengenai sekolah berbasis manajemen, menurut pandangan masyarakat dan prinsip-prinsip sekolah dasar umum dan khusus, menyatakan bahwa implementasi sekolah berbasis manajemen pada sekolah umum lebih tinggi dibandingkan sekolah khusus. Orangtua anak di sekolah umum memiliki kesempatan yang tinggi dalam beberapa hal pengambilan keputusan berkaitan dengan, guru yang bekerja, penseleksian *textbook*, standarisasi atau petunjuk, kebijakan sekolah, evaluasi kenaikan tingkat, penggunaan dana, dan rencana profesionalisasi pengembangan sekolah. Selanjutnya penelitian Deborah (2004) menyimpulkan dari survei terhadap 216 ketua dewan sekolah, hanya ada tiga subjek yang menyatakan selalu melakukan evaluasi dan laporan secara teratur. Dari survey nasional lebih dari 70 subjek secara acak, hanya 29% yang memberikan evaluasi dan laporan secara rutin, selebihnya tidak melakukan laporan atau evaluasi kepada dewan sekolah.

Hendarmoko dan Syamsudin, (2008) pada penelitian yang telah dilakukan di Jakarta menyatakan bahwa keberadaan komite sekolah memberi dampak yang positif bagi peningkatan mutu pendidikan pada jenjang SMP. Penelitian tersebut memaparkan indeks keberhasilan komite sekolah paling tinggi dilihat dari SDM dan fasilitas organisasi, sedangkan indeks keberhasilan paling rendah pada fungsi sebagai mediator. Samuri (2011) pada penelitian tentang peran dan fungsi komite pada sekolah berstandar nasional di Boyolali mengungkapkan bahwa anggota

komite sekolah SDN Berstandar Nasional menurut persepsi kepala sekolah, guru dan anggota belum mengetahui dan memahami terhadap pengembangan mutu sekolah standar nasional, karena pengetahuan dan pemahaman peran menurut persepsi Komite Sekolah masih sama dengan sekolah konvensional dan belum sesuai aspek pengembangan sekolah standar nasional. Menurut persepsi Komite Sekolah pelaksanaan peran masih tergantung dari manajemen kepala sekolah.

Thamrin (2010) memaparkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai efektifitas kinerja komite sekolah dan dewan pendidikan kota Padang menyatakan untuk melihat efektifitas kinerja komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat dilihat dari peran yang telah dilakukan oleh komite sekolah dalam melaksanakan fungsi pemberi pertimbangan (*advisory agency*), peran *supporting agency*, peran pengawasan (*controlling agency*), peran penghubung masyarakat dan pemerintah, sejauhmanakah peran tersebut berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan yang dilihat dari tujuan kegiatan dan program yang diturunkan dari visi dan misi yang ditetapkan bersama melibatkan komite sekolah

Siskandar (2008) pada penelitian yang telah dilakukan mengenai peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan subjek anggota komite dan dewan sekolah di berbagai kota di Indonesia menyatakan bahwa peran komite yang belum berhasil adalah menjalankan fungsinya sebagai mediator karena tidak ada kerjasama yang harmonis dengan semua *stakeholder* pendidikan dan dunia usaha sampai dengan penajagan kerjasama dengan lembaga masyarakat atau komite sekolah lain. Adapun peran dan fungsi lain sudah dapat berjalan dengan baik. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada sudut

pandang penilaian peran dan fungsi komite, dimana peneliti akan lebih menggarisbawahi peran karakteristik anggota komite sebagai faktor yang diasumsikan mempengaruhi pemahaman peran dan fungsi komite sekolah.

Febriani (2005) mendeskripsikan Peran Komite Sekolah di SMP Negeri I Surakarta yang menyimpulkan bahwa Komite Sekolah sudah menjalankan peran dengan baik dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Sri Mulyati (2009) mengkaji Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDN Ngegong Kota Madiun menyimpulkan bahwa peran Komite Sekolah berdampak pada mutu sekolah, manajemen sekolah dan hasil belajar.

Perlu digaris bawahi bahwa hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan berbeda baik dari segi variabel, subjek maupun metodologinya, selain itu pula tidak dapat digeneralisir pada tempat yang berbeda dengan karakteristik responden, kondisi ekonomi dan sosial budaya yang memiliki kekhasan yang berbeda-beda pula. Atas dasar pemahaman tersebut maka peneliti bermaksud mengambil lokasi penelitian di wilayah Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten yang sepanjang pengetahuan penulis belum pernah ada penelitian dengan judul maupun tema yang sama dengan penelitian penulis.